

Pemertahanan Kelas Hegemonik dalam Pertunjukan Ngadu Domba Garut

Irma Febryani

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung

Jl. Buah Batu No. 212 Cijagra, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265

febryanirm@gmail.com

ABSTRACT

Sheepfight (Ngadu Domba) as one of the performances highly favored by the people has many changes especially from the performance issues. The sheepfight is not an activity only for fun. It is more as the means for raising the living standard of the people especially of the sheepfight farmer. The research applies qualitative method. The data are obtained through observation, interview, literature study, and documentation. Antonio Gramsci's hegemony theory is applied to analyze the issues in this study. The research question in this study is how HPDKI organization maintain its power as hegemonic class in Garut sheepfight performance. The regulation of HPDKI stabilize its position as hegemonic class. HPDKI has its own strength by consistently approaching and negotiating with the people during certain time.

Keywords: Ngadu Domba Garut, Hegemonic, Performance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ngadu domba sebagai tradisi komunal masyarakat Garut, diartikan sebagai sebuah tradisi yang lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan keberadaannya sangat diterima serta diakui sebagai salah satu warisan budaya nenek moyang. Dalam hal ini, terdapat peranan-peranan yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat yang menjadikan kegiatan Ngadu domba ini tetap dipertahankan sebagai tradisi masyarakat Kabupaten Garut.

Kabupaten Garut adalah salah satu Kabupaten yang dikenal sebagai Kota Santri. Dijuluki kota santri karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Garut menganut agama Islam. Diluar itu, Kabupaten Garut

juga dikenal dengan kota yang memiliki banyak lembaga pendidikan berbasis Islam. Disebutkan oleh Hasbullah dalam Sulasman dan Gumilar bahwa, "Saat ini di Garut terdapat 108 Raudhatul Athfal (TK Islam), 151 Madrasah Ibtidaiyah, 137 Madrasah Tsanawiah, 46 Madrasah Aliyah, 942 Madrasah Diniyah, dan 515 pesantren" (Sulasman dan Gumilar, 2013: 289). Selain hal tersebut, Kabupaten Garut juga dikenal dengan kabupaten yang melahirkan banyak ulama.

Seiring dengan banyaknya ulama di Garut, terjadi perubahan tatanan sosial politik dari orde baru ke orde reformasi. Disebutkan oleh Sulasman dan Gumilar bahwa "Gerakan ulama pelan-pelan mulai bergeser seiring dengan perubahan politik di tanah air. Ulama pun mulai merambah

wilayah politik, ekonomi, dan hukum” (Sulasman dan Gumilar, 2013: 290). Para ulama di Garut juga mendeklarasikan Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syariat Islam (LP3SyI). Gerakan tersebut merupakan gerakan pemberlakuan syariat Islam di Kabupaten Garut pada tahun 2002. Dituliskan oleh Sulasman dan Gumilar bahwa “tatanan masyarakat Garut akan berjalan baik manakala syariat Islam ditegaskan.” (Sulasman dan Gumilar 2013: 292).

Peran ulama dalam menegakan syariat Islam di Kabupaten Garut sedikit banyak berpengaruh terhadap salah satu pertunjukan yang dimiliki Kabupaten ini, yaitu pertunjukan *Ngadu* domba. Diakui bahwa pertunjukan ini memang tidak sejalan dengan norma-norma agama atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Islam sesungguhnya tidak memperbolehkan kegiatan menyiksa binatang. Meskipun dibatasi sebagai media hiburan, kegiatan *ngadu* domba ini sebetulnya memang menyengsarakan hewan.

Perlakuan yang dinilai kurang baik terhadap ternak domba dituliskan oleh Yusuf sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, disebutkan bahwa:

Salah satu permainan yang dilarang adalah permainan yang memanfaatkan binatang atau burung, karena menyakiti, seperti sabung ayam jantan atau *ngadu* domba. Memang ada larangan yang tegas menyabung binatang. Manusia tidak boleh berse-nang-senang dengan melihat darah-darah mengalir dari binatang-binatang ini. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia pun tidak di-kasihi. (Yusuf, 1996: 184)

Larangan menyiksa binatang sudah tertuang jelas dalam hadist sebagai panutan utama umat Islam setelah Al Quran. Larangan menyiksa binatang tidak sekedar dibuat-buat oleh manusia sebagai media penegakan moral. Sejalan dengan Cliffort Gritz yang menyatakan bahwa agama harus mampu menegaskan sesuatu

(memiliki kekuatan lebih), dan tidak berakhir menjadi aturan-aturan penegak moral.

Apa yang ditegaskan agama manapun mengenai hakikat dasariah dari kenyataan bisa kabur, dangkal, atau terlalu seringkali bertentangan; tetapi agama harus menegaskan sesuatu, kalau agama tidak mau hanya terdiri dari koleksi praktik-praktik yang diterima dan sentimen-sentimen konvensional yang biasanya kita acu sebagai moralisme. (Gritz, 1992: 15)

B. Metode

Sebuah metode berpengaruh besar terhadap hasil penelitian, mengenai metodologi diungkapkan oleh Kutha Ratna bahwa:

Metodologi menggali pengertian bahwa dalam ilmu pengetahuan, dalam hubungan penelitian, yang memegang peranan penting adalah filsafatnya, yang kemudian dijabarkan ke dalam cara-cara yang bersifat praktis, sebagai metode, bukan semata-mata objeknya. Bagimanapun pentingnya objek apabila dilakukan dengan menggunakan metodologi dan metode yang tidak benar, maka tidak akan diperoleh hasil yang memuaskan (Ratna, 2010: 41).

Penelitian kualitatif menyajikan data apa adanya yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang dialami oleh orang-orang yang dipandang tau mengenai situasi tersebut (Sugiyono, 2011: 298) “Pada situasi sosial/objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu”. Peneliti mengungkap semua yang terjadi dalam *ngadu* domba melalui data. Data diambil melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teori milik Antonio Gramsci, yakni hegemoni. Bagi Gramsci, “Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis” (Simon, 2004: 19). Dalam konsep

hegemoni yang ditulis Gramsci, pihak penguasa lebih banyak menggunakan kekuasaannya dengan cara mencari sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama, baik antar kelompok maupun antar individu melalui sebuah perdebatan dan penelitian. Sesuai dengan yang ditulis Simon dalam bukunya yang menyebutkan bahwa hegemoni adalah suatu organisasi konsensus.

Hegemoni berkembang dengan membawa konsep Gramsci tentang penyatuan berbagai kelompok sosial atau juga hubungan anatara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Simon menuliskan bahwa:

“Hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik atau kelompok kelas hegemonik adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui pandangan politik dan ideologis” (Simon, 2004: 22).

Sejalan dengan hal tersebut, Gramsci juga menyatakan bahwa,

Hegemoni memerlukan penyatuan berbagai kekuatan sosial yang berbeda kedalam sebuah aliansi yang luas yang mengungkapkan kehendak kolektif semua rakyat, sehingga masing-masing kekuatan ini bisa mempertahankan otonominya sendiri dan memberikan sumbangan dalam gerak maju menuju sosialisme. (Simon, 2004: 24)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pro dan kontra yang beredar di masyarakat mengenai *ngadu* domba menggerakkan para tokoh untuk membentuk aliansi yang menengahi kedua kubu tersebut, yaitu HPDKI. Masyarakat yang kontra menganggap kegiatan *ngadu* domba sebagai kegiatan kekerasan yang melanggar norma agama, sedangkan peternak dan sebagian masyarakat menganggap bahwa *ngadu* domba adalah sebuah kebudayaan masyarakat Garut

yang harus dipertahankan. Dalam hal ini terjadi negosiasi antara semua kubu yang menghasilkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut diantaranya menyatakan bahwa kegiatan *ngadu* domba tetap dilaksanakan seperti biasa oleh masyarakat peternak namun berlandaskan aturan-aturan yang harus dilaksanakan pada setiap pelaksanaannya. Aturan tersebut dianggap sebagai sebuah jalan yang menengahi antara peternak dan masyarakat yang kontra. Dengan berbagai aturan yang diterapkan, kegiatan *ngadu* domba ini berganti nama menjadi Seni Ketangkasan Domba Garut.

Kesepakatan yang dihasilkan mampu menyatukan berbagai asumsi masyarakat mengenai *ngadu* domba sebagai sebuah kebudayaan yang harus dipertahankan. Didukung oleh konsep yang diciptakan oleh Giddens bahwa sebuah kebudayaan bisa mengalami perubahan.

Masyarakat pelaku *ngadu* domba seyogyanya memiliki struktur pengetahuan yang secara turun temurun diwariskan pada masyarakat. *Ngadu* domba menjadi pertunjukan yang sangat diminati pada masa itu, namun juga oleh sebagian pihak dianggap sebagai kegiatan yang kurang pantas mengingat kegiatan tersebut dianggap sebagai penyiksaan terhadap hewan ternak dan tidak sesuai dengan norma-norma agama.

Domba garut yang banyak dikenal oleh masyarakat saat ini merupakan domba hasil perkawinan silang, artinya bukan murni domba lokal. (Markens dan Soemirat dalam Hastono, 2009) mengatakan, Domba Garut sekarang ini berasal dari domba merino yang masuk ke Kota Garut pada tahun 1869, dan terjadi persilangan pada domba lokal dan domba kaapstad, kemudian secara bertahap menyebar ke beberapa wilayah seperti Limbangan, Kabupaten Sumedang, dan Bandung.

Ngadu domba mulai hadir bersamaan dengan kepemimpinan Kanjeng Dalem RAA Moesa Soeria Kartalegawa (Bupati Garut periode 1929-1944). Ada juga pihak yang menyebutkan bahwa kegiatan *ngadu* domba ini hadir sejak sebelum tahun 1920. Melihat angka tersebut, kegiatan *ngadu* domba ini bisa dibilang sebagai pertunjukan yang sangat eksis di kalangan masyarakat, karena bukannya ditinggalkan, kegiatan *ngadu* domba semakin lama semakin populer dan digemari warga Garut bahkan warga di luar Garut.

Peternak domba Garut banyak memberikan kontribusi tidak hanya pada kegiatan *ngadu* domba Garut itu sendiri, melainkan juga untuk pengembangan kualitas ternak yang menyebabkan harga jualnya terus meningkat dalam hitungan tahun di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Ian Ruhyani mengenai peternakan domba miliknya, harga domba saat ini terhitung sangat tinggi. Di Kecamatan Leles, satu domba adu yang masih berusia tiga bulan dapat dihargai Rp. 5.000.000,00.

Para peternak domba secara terus menerus bereksperimen untuk mendapatkan domba dengan kualitas paling baik. Eksperimen untuk mendapatkan domba yang tangguh pun dilakukan dengan cara mengikuti berbagai kontes *ngadu* domba skala kecil dan besar. Hal tersebut membuat kegiatan *ngadu* domba yang diadakan tidak pernah sepi dari peserta. Deiwan yang merupakan ketua HPDKI Jawa Barat yang juga seorang peternak mengatakan, "Kalau budaya tidak dipelihara, kemudian menyatakan anti terhadap kegiatan seni ketangkasan, itu akan sulit dan banyak peternak, tidak bisa maju. Sudah banyak contohnya, pembibitan sapi tanpa budaya, hal tersebut hilang. Memelihara domba

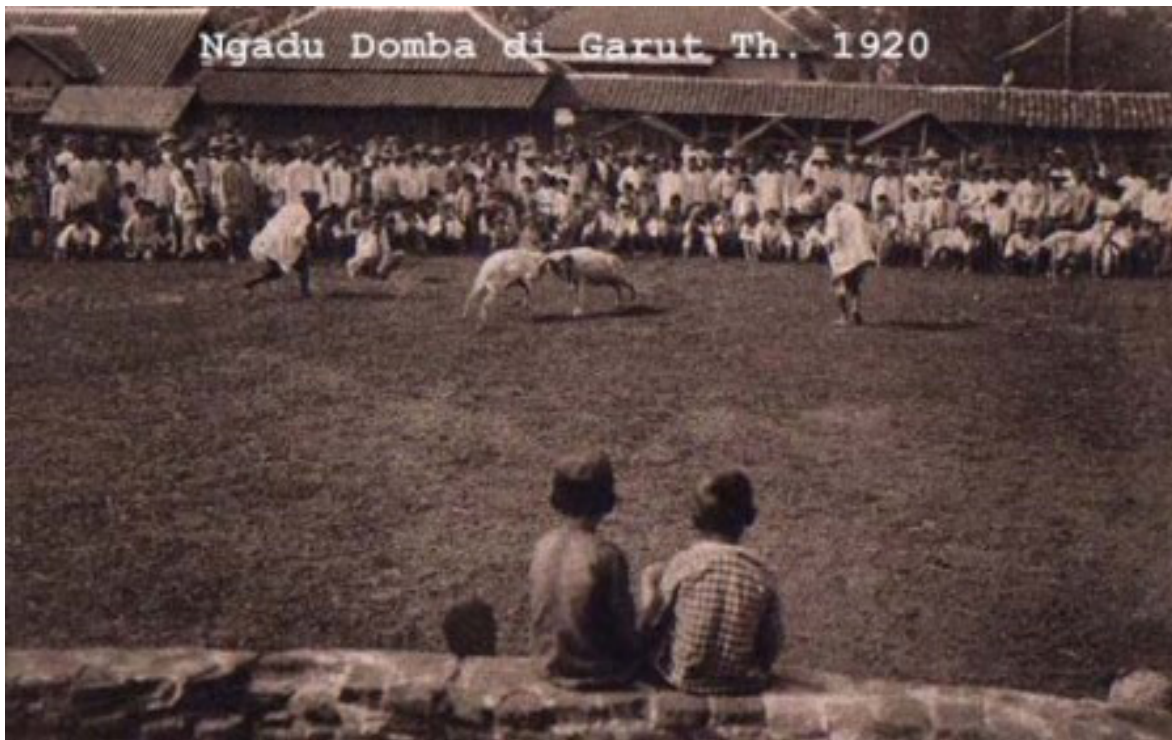
tangkas itu termasuk pemeliharaan genetik, karena peternak secara langsung mencari domba yang baik dengan cara mengkawinkan domba-domba demi mencari satu yang terbaik. Kalau dibiarkan tanpa kegiatan ini, akan membutuhkan biaya yang tinggi. Dengan seni tangkas, pemerintah tidak usah membiayai, tidak usah mempersiapkan orang-orang, kan sudah banyak peternak, asal budayanya jangan dihilangkan" (Wawancara, 17 Juli 2018, Meatshop Jl. Ciliwung No 9 Bandung).

Melalui kegiatan *ngadu* domba, para peternak berusaha menghasilkan domba dengan kualitas yang baik. Hal tersebut membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mutu ternak. Deiwan mengatakan, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk hal ini, karena para peternak sudah memiliki inisiatif untuk melakukan peningkatan mutu tanpa meminta bantuan biaya sepeserpun. Dalam perkembangannya, *ngadu* domba dapat dibagi kedalam dua periode. Dua periode tersebut adalah periode Ngaben dan *Midang*.

A. Ngaben dan Midang

Dalam periode Ngaben, *ngadu* domba sering di salahgunakan oleh masyarakat sebagai ajang judi dan banyak menimbulkan hal negatif lainnya. "Pada prakteknya, ngaben cenderung mengarah pada pengaduan dan perjudian, yang sering menimbulkan perkelahian antar pemilik domba ataupun penonton". (Arum dan Warjita, 2010: 19).

Dalam ngaben ini diterapkan berbagai aturan. Meskipun bukan aturan tertulis, namun aturan ini yang biasa digunakan oleh masyarakat pada zaman dulu ketika hendak melaksanakan *ngadu/ngaben* domba. Aturan-aturan tersebut dituliskan oleh Arum dan Warjita.



Gambar 1
Ngadu domba zaman dulu
(Dokumentasi: Sundaologi.blogspot.com, 30/07/2018)

Pada periode ngaben, peraturan pertandingan atau permainan adalah sebagai berikut:

1. Pertandingan berakhir sampai salah satu domba dinyatakan mati. Akibatnya pemilik domba yang mati merasa dendam, yang tidak jarang menimbulkan perkelahian;
2. Selama permainan berlangsung tidak dipimpin wasit;
3. Yang terjun langsung di lapangan (bobotoh) adalah pemilik domba yang dipertandingkan.
4. Pertandingan berlangsung di lapangan secara bebas. Belum ada ketentuan baik mengenai ukuran luas lapangan, maupun garis pemisah antara arena pertandingan dengan penonton. (Arum dan Warjita (2010: 21)

Periode selanjutnya adalah periode pamidangan (1970 hingga sekarang). Dimana hal-hal yang ditetapkan oleh masyarakat pada periode ngaben tidak lagi digunakan oleh masyarakat.

Pada periode pamidangan sampai sekarang, seiring dengan pergeseran nilai dalam masyarakat pendukungnya, baik tujuan maupun peraturan, permainan mulai disempurnakan. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian atau kerusakan di kedua belah pihak, serta untuk menjaga ketertiban penonton. (Arum dan Warjita 2010:21)

Pamidangan dicanangkan untuk merubah citra buruk yang sempat melekat terhadap keberadaan kegiatan *ngadu domba*. Kegiatan ini dianggap sebagai penyiksaan terhadap binatang, kegiatan *ngadu domba* juga sering kali dilakukan bersamaan dengan perjudian. Masyarakat apresiator dan juga para pemilik domba



Gambar 2
Antusiasme Masyarakat Terhadap Ngadu domba
(Dokumentasi: Irma Febryani, 2017)

biasanya mempertaruhkan sejumlah uang atau seekor domba adu sebagai taruhannya. Tentu hal ini tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Istilah pamidangan memiliki pengertian yang cenderung ke arah bisnis, sebab permainan ini semata-mata dilakukan untuk mempromosikan dan meningkatkan harga jual domba adu. Dengan demikian penjualan tidak ditentukan besar kecilnya domba, tetapi ditentukan oleh nilai-nilai keindahan domba, baik tanduk, bulu maupun keindahan gerak ototnya pada saat bertanding di arena. Arum dan Warjita (2010, hlm. 20).

B. Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI)

HPDKI datang dengan membawa sebuah misi, yakni membuat sebuah aliansi yang mengatur tentang jalannya sebuah tradisi *ngadu domba* yang salah satu tujuan

besarnya adalah agar tradisi *ngadu domba* ini dapat diterima oleh masyarakat luas. Melalui HPDKI, tercipta hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat dan peternak domba. Pemerintah, masyarakat dan peternak saling memberikan keuntungan dan masing-masing dari mereka juga saling mengambil keuntungan. Sesuai dengan pernyataan Bakker,

Struktur kebudayaan, sesudah ditinjau tentang dimensi horizontal, masih harus ditilik dan dinilai atas dimensi vertikal. Itulah fenomena stratifikasi namanya, yang dengan panjang lebar diperbincangkan oleh ilmu masyarakat; tetapi dalam ilmu kebudayaan dibatasi pada dwilapisan: pemimpin dan penampung kebudayaan. Dipandang dari sudut pandang struktur, antara kedua lapisan harus ada hubungan timbal balik yang aktif (1984: 100)

Hubungan timbal balik ini juga yang dinyatakan oleh Deiwan bahwa HPDKI merupakan organisasi yang mengayomi kebawah dan menyambungkan keatas.

HPDKI berhasil melemahkan wilayah material *ngadu* domba dengan cara menciptakan aturan-aturan yang secara tidak langsung merubah *ngadu* domba sebagai tradisi lama. HPDKI memasuki ranah teknis pertunjukan *ngadu* domba yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Perubahan yang dibawa oleh organisasi ini berhasil menciptakan sebuah struktur pengetahuan baru yang membuat pertunjukan *ngadu* domba lebih dikenal dengan istilah Seni Ketangkasan Domba Garut yang lebih menonjolkan sisi pertunjukan.

Perubahan yang terjadi pada wilayah material ini membuat pertunjukan *ngadu* domba menjadi sebuah kegiatan yang menyampingkan sisi kekerasan yang sudah lama melekat menjadi ajang ketangkasan yang lebih mengutamakan unsur estetis karena memang lebih mengutamakan sisi pertunjukannya. Salah satu faktor paling menonjol dalam hal ini adalah kriteria pemenangan seekor domba yang tidak lagi dilihat melalui mati nya salah satu domba dalam arena, melainkan kemenangan tersebut ditentukan oleh juri melalui berbagai kriteria seperti teknik pukulan, ancang-ancang sebelum melakukan pukulan, bahkan kegagahan dari tubuh domba yang dipertunjukan.

Hegemoni sudah disebutkan sebagai sebuah kekuasaan yang tidak hierarki. Masing-masing kelas sosial saling mengeksploitasi kelas sosial lain, namun dengan cara yang halus. Keempat kelas sosial yang sudah disebutkan saling memberikan

keuntungan satu sama lain, dan secara tidak sadar, masing-masing kelompok sosial juga saling mengambil keuntungan dari kelompok sosial lain.

Perubahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini bisa ditafsirkan sebagai sebuah perubahan sebuah struktur pengetahuan. Melalui konsep hegemoni yang digunakan, maka akan dicari keterkaitan antara hegemoni yang terjadi dengan perubahan dari pertunjukan domba adu, serta bagaimana upaya HPDKI dalam mempertahankan kedudukannya sebagai kelas hegemonik.

Pelaku pertunjukan *Ngadu* domba memiliki keleluasaan dalam melakukan hobinya. Mereka diberikan ruang yang cukup banyak untuk mendapatkan semua kepentingannya. Begitu juga dengan pemerintah dan organisasi HPDKI, para pelaku pertunjukan *Ngadu* domba dan juga berkat peran masyarakat, kedua kelompok sosial ini berhasil menjalankan misinya, yaitu mempertahankan pertunjukan *Ngadu* domba sebagai warisan budaya masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Garut.



Gambar 3
Ngadu domba Sebagai Sarana Hiburan Masyarakat
(Dokumentasi: Irma Febryani, 2018)

Masyarakat juga mendapatkan sarana hiburan yang menarik. Mereka bisa menikmati pertunjukan *Ngadu* domba dari jarak yang cukup dekat karena pertunjukan ini cukup sering digelar di berbagai daerah. Pertunjukan ini juga bisa lebih diterima oleh masyarakat yang tadinya kontra dengan adanya pertunjukan domba adu dalam bentuk lain, yaitu domba *catwalk* dan raja dogar.

Organisasi HPDKI ini terbilang sangat eksis, karena di hampir setiap pertunjukan adu domba, organisasi ini ikut terlibat sebagai salah satu pendukung utama, juga sering kali secara independen menyelenggarakan pertunjukan *Ngadu* domba di berbagai kota/kabupaten.

Seluruh aturan yang diterapkan oleh HPDKI diterima dengan tangan terbuka oleh para pelaku kegiatan *Ngadu* domba di seluruh daerah. Aturan yang dituliskan oleh HPDKI diterapkan dalam seluruh

kontes ketangkasan domba adu di berbagai wilayah tanpa terkecuali. Hal ini membuat eksistensi dari organisasi HPDKI meningkat. Bahkan seorang ketua HPDKI menjamin bahwa tidak satupun peternak domba adu di berbagai wilayah yang tidak mengakui keberadaan HPDKI ini.

HPDKI dalam tingkat kecamatan tepatnya di Kecamatan Leles, berhasil mengadakan kegiatan latihan *Ngadu* domba dalam dua kali dalam sebulan. Dari kegiatan tersebut, organisasi mendapatkan pemasukan dari setiap domba yang terdaftar. Menurut Ian Ruhyan, dana yang di terapkan bagi setiap domba peserta adalah Rp. 20.000,00 bagi setiap domba. Dana tersebut biasanya disimpan dan akan digunakan untuk kontes *Ngadu* domba dalam skala yang lebih besar. Tentu dalam kepengurusannya, dana ini dapat juga dipergunakan untuk para anggota dari kelompok HPDKI.



Gambar 4.
Barisan Para Domba yang Mengikuti Latihan Rutin
di lapangan Ciburial Kabupaten Garut
(Dokumentasi: Irma Febryani, 2018)

Dampak hegemoni bagi berbagai kelas sosial tersebut juga tentunya berdampak positif bagi pertunjukan domba Garut. Berkat kerjasama yang baik empat kelompok sosial tadi, juga menjadikan pertunjukan *Ngadu* domba Garut lebih dikenal dan semakin diminati oleh masyarakat luar Kabupaten Garut. Terbukti dengan banyaknya peternak-peternak domba Garut di luar wilayah Garut, misalnya di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Tasikmalaya, dll.

Meningkatnya peminat pertunjukan *Ngadu* domba ini juga dapat dilihat dari banyaknya peserta *Ngadu* domba yang datang dari luar Garut pada setiap kontes ketangkasan yang diadakan di Kab. Garut. Juga saat ini sudah banyak digelar kontes serupa di berbagai kota/kabupaten lain. Uniknyanya, ketika pertunjukan ini ditampilkan pada masyarakat di luar Kabupaten Garut, nama domba Garut tetap melekat dan semakin dikenal sebagai identitas dan simbol dari Kabupaten Garut.

C. Upaya Mempertahankan Kuasa HPDKI sebagai Kelas Hegemonik

HPDKI sebagai kelas hegemonik harus mampu mempertahankan dominasinya. Hegemoni merupakan suatu hal yang harus terus dipertahankan. Gramsci mengatakan, "hegemoni tidak pernah dapat diperoleh begitu saja, tetapi harus diperjuangkan terus menerus." (2014, hlm. 45) Kata terus menerus dalam pendapat gramsci tersebut berarti bahwa ketika hegemoni didapatkan, hal ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa usaha-usaha yang dilakukan untuk mempertahankannya.

HPDKI tentu melakukan berbagai usaha demi terciptanya stabilisasi. Usaha-

usaha tersebut diantaranya adalah pembentukan organisasi HPDKI tingkat kecamatan pada setiap kecamatan di berbagai daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antara masyarakat peternak dengan HPDKI pusat. Namun dari hal ini dapat terbaca bahwa HPDKI gencar menyebarkan kekuasaan dan berusaha untuk mempertahankan diri sebagai kelompok dominan. HPDKI ada di setiap jenjang mulai dari kecamatan hingga nasional.

Usaha lain yang dilakukan oleh HPDKI adalah membuat sebuah aturan yang menyatakan bahwa kegiatan *ngadu* domba tidak boleh dilakukan oleh instansi atau organisasi lain selain HPDKI. Hal ini dimaksudkan agar regulasi yang telah ditetapkan oleh HPDKI dapat terus diaplikasikan pada setiap kontes atau pertunjukan *ngadu* domba. Keseragaman aturan serta dogma yang ditetapkan HPDKI ini merupakan usaha untuk mempertahankan hegemoni yang telah berhasil didapatkan. Ketika suatu kelompok sosial telah menjadi sebuah kelompok hegemonik/dominan mereka harus mempertahankan dengan gigih kekuasaan yang ada dalam genggamannya.

HPDKI secara rutin mengadakan rapat kerja tahunan yang dihadiri oleh seluruh anggota HPDKI pada semua tingkatan. Raker terakhir HPDKI diadakan pada bulan Mei 2018. Dalam rapat kerja tersebut dibahas mengenai perkembangan organisasi HPDKI, berbagai kendala yang dihadapi serta pembahasan mengenai kegiatan kontes yang hendak diadakan pada masa mendatang.

Masyarakat menikmati pertunjukan *Ngadu* domba sebagai sarana hiburan murah yang cukup mudah ditemui, bahkan

dengan adanya pertunjukan ini, mereka dapat berdagang dan mendapatkan keuntungan lebih. Begitu juga dengan pelaku *ngadu* domba. Pelaku pertunjukan *ngadu* domba tentunya memiliki kepuasan tersendiri ketika dapat berkumpul dengan rekan-rekan yang memiliki kesamaan hobi, yaitu *ngadu*. Organisasi HPDKI memperoleh eksistensi karena hampir setiap pertunjukan *Ngadu* domba, mereka dilibatkan sebagai pendukung utama. Pemerintah dalam hal ini pun mendapatkan keuntungan banyak, yakni dapat dianggap sukses sebagai pemerintahan yang pro terhadap budaya, berhasil mempertahankan warisan leluhur dan dianggap menjadi agen utama pelestarian budaya Jawa barat.

SIMPULAN

Ngadu domba merupakan salah satu seni pertunjukan yang sudah ada sejak tahun 1920-an, dicanangkan oleh Bupati Garut yang ketika itu menjabat, yaitu RAA Moesa Soeria Kartalegawa. *Ngadu* domba termasuk seni pertunjukan yang eksis dan cukup bisa mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. *Ngadu* domba tumbuh sebagai seni pertunjukan yang menuai banyak pro dan kontra. *Ngadu* domba dianggap sebagai pertunjukan yang tidak sesuai dengan syariat agama dan norma.

Ngadu domba pada zaman dulu disebut dengan ngaben. Ngaben merupakan istilah yang digunakan pada kegiatan *ngadukeun* domba yang diadakan oleh masyarakat di sebuah lapangan luas. Kegiatan ngaben berjalan tanpa diberlakukan aturan, kriteria kemenangan domba adalah ketika salah satu domba mati dalam arena pertandingan. Ngaben juga sangat identik dengan kegiatan judi yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi apresiator.

Seiring waktu, muncul organisasi yang di dalam nya mengatur keberlangsungan kegiatan *ngadu* domba di masyarakat Jawa Barat, yaitu HPDKI. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang dinaungi oleh pemerintah Jawa Barat. Kemunculan HPDKI membatasi para pelaku adu domba untuk melaksanakan kegiatan nya. HPDKI membuat sebuah aturan yang dianggap sebagai solusi atas terjadinya pro dan kontra yang ada di masyarakat. Aturan-aturan yang di buat HPDKI diantaranya adalah membatasi jumlah tandukan pada setiap domba yang bertarung. Kini, domba yang bertarung tidak lagi dipertarungkan hingga mati. HPDKI merubah total citra *ngadu* domba yang tadinya sangat dinilai negatif. Kegiatan *ngadu* domba yang dulu dikenal dengan sebutan ngaben diganti dengan istilah *midang/pamidangan/Seni Ke-tanggakan Domba Garut*.

Namun tugas HPDKI tidak berhenti disitu, sebagai sebuah organisasi, HPDKI tentu membutuhkan sebuah pengakuan. Pengakuan tersebut tentunya akan didapat ketika HPDKI mampu mempertahankan posisinya sebagai kelas hegemonik. Berbagai upaya dilakukan oleh HPDKI untuk mencapai tujuannya, diantaranya membagi kekuasaan kedalam sektor terkecil yaitu tingkat Kecamatan. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan rutin antara anggota HPDKI dengan masyarakat pada setiap kurun waktu tertentu. Namun yang paling dapat dirasakan, upaya HPDKI untuk mempertahankan kedudukannya adalah dengan membuat regulasi yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pertunjukan *ngadu* domba Garut yang diadakan oleh organisasi lain selain HPDKI.

Daftar Pustaka

- Al Qardhawi, Yusuf. 1996. *Islam dan Seni*. Bandung : Pustaka hidayah.
- Greetz, Clifford. 1992. *Agama Sebagai Sebuah Sistem Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hastono. 2009. *Pelestarian Domba Garut Melalui Budaya Domba Tangkas (Domba Adu)*. Tabloid Sinar Tani.
- J.W.M Bakker. 1984. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: SJ. PENERBIT PT Kanisius.
- Ratna K. 2010. *Metodologi penelitian: kajian budaya dan ilmu sosial humaniora pada umumnya*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sulasman dan Gumilar. 2013. *Teori-Teori Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi*. Pustaka Setia: Bandung
- Sundaologi.blogspot.com, 30/07/2018
- Warjita, Arum. (2010). *Pamidangan Seni Ketangkasan Domba Garut*. Bandung: Sanjaya Putra.